



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PPN PALABUHANRATU

LAPORAN KINERJA

20 26

TRIWULAN I



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia – Nya Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPN Palabuhanratu kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKj PPN Palabuhanratu ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang dilaporkan secara bertahap. LKj PPN Palabuhanratu Triwulan I tahun 2026 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja tahun 2026.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, untuk itu kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan sangat kami harapkan agar laporan ini bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu dan turut serta dalam penyelesaian laporan ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua, Aamiin.

Palabuhanratu, 15 April 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



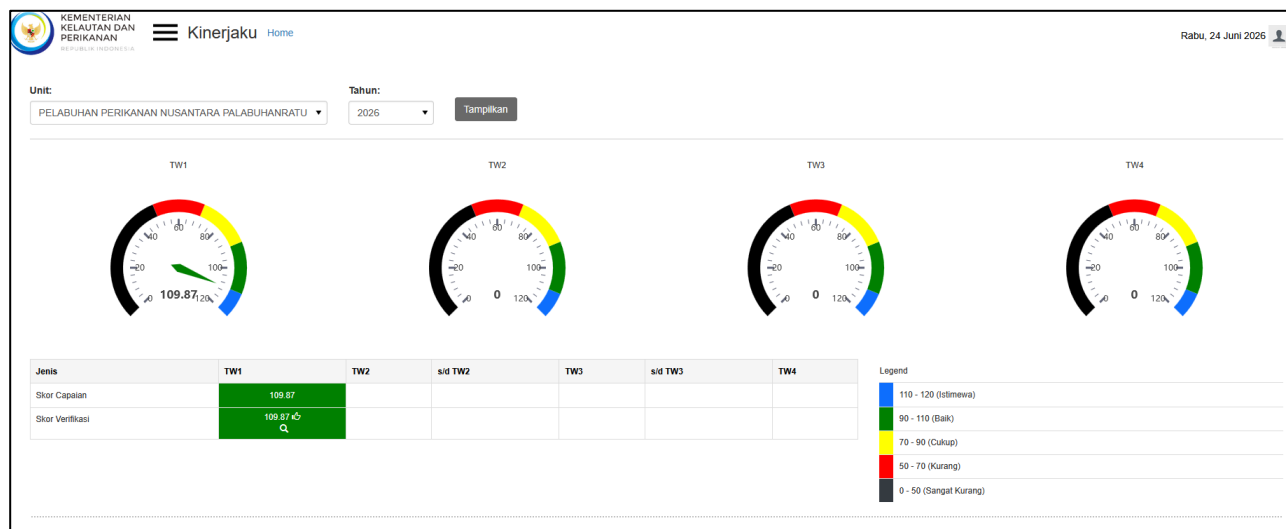
Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono, A.Pi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 14.587.542.000,-. Namun setelah adanya efisiensi, dukungan anggaran Tahun 2026 adalah sebesar Rp. Rp. 14.030.603.000,-. Dengan dukungan anggaran tersebut pada triwulan 1 tahun 2026 capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 5.143.236.894,- atau 36,66%. Secara kinerja, PPN Palabuhanratu mendapat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108,87%, sebagaimana terlihat pada *dashboard* dibawah ini:



Gambar 1. Dashboard Aplikasi Kinerjaku PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2026

Hal ini didukung oleh pencapaian 8 (delapan) indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada triwulan 1 adalah sebagai berikut:

1. PNPB Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta);
2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);

3. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai);
4. Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai);
5. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal);
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu (Persen);
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen); dan
8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Nilai).

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan dan pengawasan untuk pencapaian kinerja periode selanjutnya. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama pimpinan dan pegawai lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Kedudukan.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi.....	3
1.5 Aspek Strategis.....	5
1.6 Sistematik Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis PPN Palabuhanratu 2021 – 2026	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.3 Target Kinerja dan Anggaran.....	10
2.4 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	15
SS 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	17
SS 2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat.....	21
SS 3 Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing yang optimal dan bertanggung jawab.....	23
SS 4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Palabuhanratu ...	28
SS 5 Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	30
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	45
4.4 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	45
LAMPIRAN DATA DUKUNG KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2026	11
Tabel 2.	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026	12
Tabel 3.	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026	12
Tabel 4.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2026	16
Tabel 5.	Capaian IKU "Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu" Tahun 2026.....	18
Tabel 6.	Capaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 7.	Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026.....	24
Tabel 8.	Capaian IKU "Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 9.	Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 10.	Capaian IKU " Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 11.	Capaian IKU " Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu " Tahun 2026	34
Tabel 12.	Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026.....	39
Tabel 13.	Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Tahun 2026	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Dashboard Aplikasi Kinerja PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2026.....	iii
Gambar 2.	Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	5
Gambar 3.	Dashboard Aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2026	15
Gambar 4.	Grafik Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam Triwulan I Tahun 2026.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lima kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan kawasan terpilih sebagai basis atau sentra pengelolaan perikanan untuk pengembangan ekonomi usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan masyarakat, melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan yang berfungsi melayani, mendorong, dan memacu pembangunan kawasan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) sebagai *mainstream* dari pembangunan kelautan dan perikanan mengingat wilayah laut/pantai dimana kegiatan perikanan berada merupakan sumberdaya anugerah potensial (*potential endowed resources*) yang khas memiliki keterkaitan (*intervedency*) yang kompleks dengan bidang sosial-perekonomian-budaya masyarakat disekitarnya. Kesiapan komponen infrastruktur/ fasilitas/ sarana penangkapan akan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut.

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan Pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

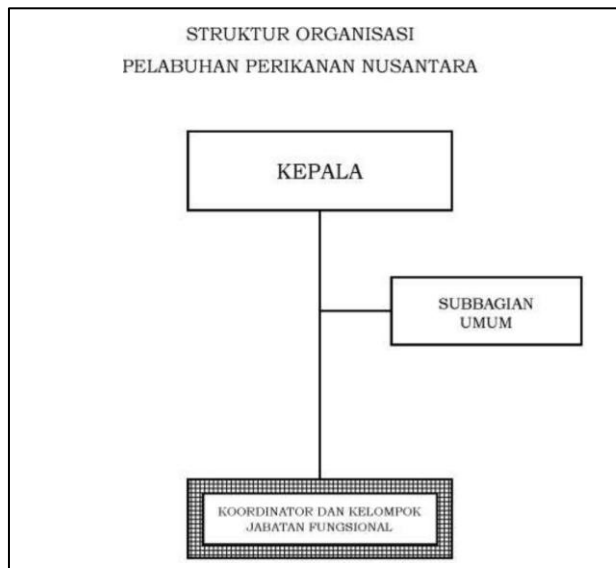
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 2. *Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu*

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.5 ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional, dan berintegritas;

- d. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan
- e. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel.

1.6 SISTEMATIK PENYAJIAN

Penyusunan LKj 2026 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/ Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan pembahasan IKU sesuai dengan *Balanced Score Card* (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis

akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategis pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 2025 – 2029

VISI

Sesuai dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan Pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama Pembangunan (*ultimate goals*) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden serta tiga tujuan utama Pembangunan (*ultimate goals*), Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan **Bersma Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2,5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang

melaksanakan Asta Cita 7.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ Lembaga lain yang beraktfitas di dalam Pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/ harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
2. Sasaran kegiatan kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah **“Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
3. Sasaran kegiatan ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang optimal dan bertanggung jawab”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;

- b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
4. Sasaran kegiatan keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
- a. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
 - b. Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan.
5. Sasaran kegiatan kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah **“Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu;
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan (NKPA) Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2026 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. *Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2026*

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	1.176,29
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Ton)	6500
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	87
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	36
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	60
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	33
4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	310
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	88,20
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	84,50
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (%)	77
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Nusantara Palabuhanratu (%)	
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	92,10
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	71,75
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	88,80

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 14.587.542.000,-.

Tabel 2. *Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026*

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	318.181.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.269.361.000
JUMLAH		Rp. 14.587.542.000,-

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target — target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator *output* dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya — upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. *Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026*

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu	Pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
		Pelaksanaan Penataan Dokumen Pelayanan Pelabuhan Perikanan
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu	Sosialisasi Dan Monev Pengguna Jasa Di Pelabuhan Perikanan
		Rapat Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Pelabuhan
4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu	Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
		Publikasi Dan Promosi Pelabuhan Perikanan
		Bimtek Dan Pembinaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Pelabuhan
		Operasional Inspeksi Pengendalian Mutu Di Pelabuhan Perikanan
		Surveillance ISO 9001:2015
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu	Tata Kelola Dan Operasional Kesyahbandaran
		Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kesyahbandaran dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPB pasca produksi dan penangkapan ikan terukur
		Pengelolaan Dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Di Pelabuhan Perikanan
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu	Rehabilitasi Gedung Arsip
		Rehabilitasi IPAL Pelabuhan
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	Operasional K5 Di Pelabuhan
		Surveillance ISO 14001:2015
		Bulan Cinta Laut
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Pelaksanaan Pemeriksaan kelaikan/pengukuran/pengujian/inspeksi kapal perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan/Nelayan
10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	Penguatan WBK Lingkup PPN Palabuhanratu
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu	Implementasi PIPK dan SPIP Lingkup PPN Palabuhanratu
12	Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan Kinerja Lingkup PPN Palabuhanratu
13	IP ASN PPN Palabuhanratu	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai
		Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan

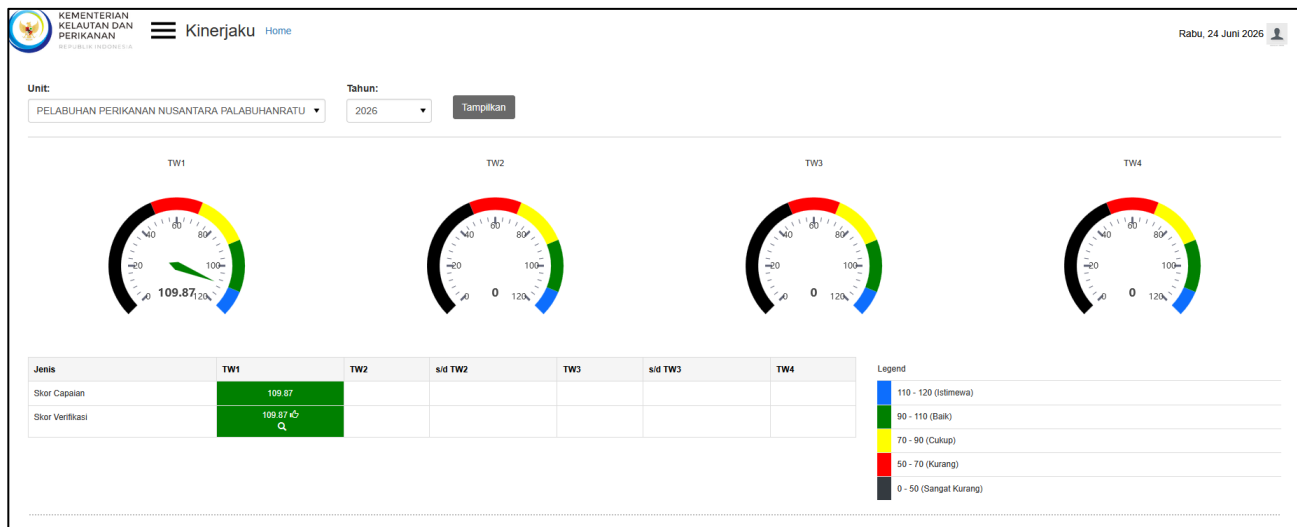
Indikator Kinerja Utama		Kegiatan Pendukung
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Langganan Daya dan Jasa
		Pelayanan Terkait Operasional Satker
		Langganan Jasa Lainnya
		Pengadaan Sarana Perkantoran
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	Pemeliharaan Kantor
16	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu	Gaji dan Tunjangan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu	Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu	Review Standar Pelayanan dan Forum Konsultasi Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) mendukung pembangunan perikanan melalui 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Metode pengukuran kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2026 seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2026

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memperoleh rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2026 Triwulan I sebesar 109,87% dan termasuk dalam kategori **“Baik”** (≥ 110). Adapun rincian pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2026

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I	Capaian TW I	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	1.176,29	294,07	582,57	198,10
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	6500	1.070	1.126	105,23
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu (%)	100			
		4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	87	87	88	101,15
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu (%)	36			
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu (%)	60			
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu (Nilai)	33	33	81,53	247,06
4	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	310	302	308	101,99
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28			
5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,50			
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu (%)	86	86	100	116,28
		12	Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu (Nilai)	88,20			
		13	Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu (Indeks)	84,50			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I	Capaian TW I	%
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)	77	77	100	129,87
		15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu (%)	82			
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu (Nilai)	92,10			
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	71,75			
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu (Indeks)	88,80	88,80	92,36	104,01

SS 1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu

Sasaran kegiatan - 1 “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

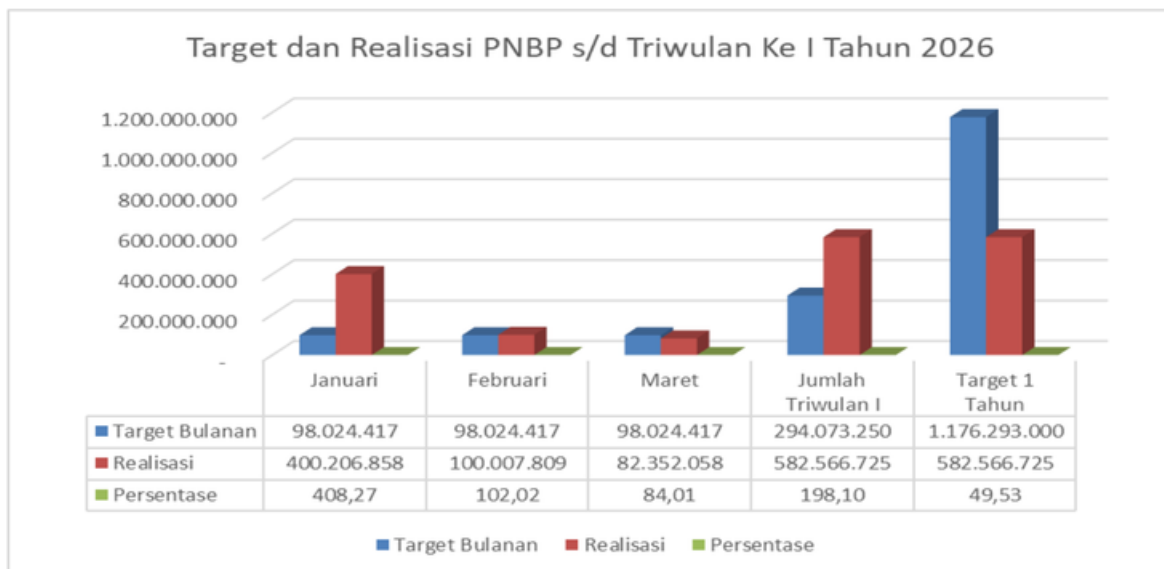
Pungutan PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021 serta Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di

Pelabuhan Perikanan. Adapun Jenis pelayanan jasa yang menghasilkan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meliputi: Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan; Jasa Pas Masuk Kendaraan; Jasa Coldstorage; Jasa Kebersihan; Pengadaan Air; Penggunaan Alat Berat; Jasa Perbengkelan; Jasa Penggunaan Lahan dan Bangunan; Pengadaan Es; Jasa Tempat Penumpukan Barang; Jasa Pemakaian mess; Jasa pemakaian ruang rapat; dan Pelayanan Listrik.

Tabel 5. Capaian IKU “Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu” Tahun 2026

SS 1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu												
IKU 1	Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
211.07	324.07	-	486.13	232.41	1176.29	294.07	582.57	198.11	49.53	150.66	1176.29	49.53	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026	
405.85	718.78	-	920.07	1,552.92		588.14		0.00	0.00	-100.00		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026	
620.43	1,167.27	-	1,300.00	2,104.61		882.21		0.00	0.00	-100.00		0.00	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026	
945.50	1,666.23	1532.69	1,725.00	2,513.46		1176.29		0.00	0.00	-100.00		0.00	

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 582.566.725,- dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dicanangkan dalam perjanjian kinerja pelabuhan yaitu sebesar Rp. 294.073.250,- atau 198,10%. Sedangkan dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp. 1.176.293.000,- sudah mencapaia 49,53%.



Gambar 4. Grafik Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan Grafik tersebut diatas, bahwa penerimaan tertinggi tahun 2026 adalah penerimaan pada bulan Januari 2026 sebesar Rp. 400.206.858,- atau 408,27% dari target penerimaan bulan Januari 2026 sebesar Rp. 98.024.417,-. Penerimaan tertinggi pada bulan Januari 2026 tersebut diatas adalah dari penerimaan Pemanfaatan Lahan, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 233.155.592,-. Perbandingan penerimaan Triwulan Ke I (satu) Tahun 2026 dengan Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp350.154.494,00 atau 150,66% dari penerimaan sebesar Rp. 232.412.231,- menjadi Rp. 582.566.725,-.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan dari layanan Jasa Tambat Kapal ukuran 30–100 GT baru mencapai **13,12%**. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kapal yang melakukan kegiatan tambat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Aktivitas tambat pada periode berjalan didominasi oleh kapal motor berukuran **5–30 GT**, sehingga kontribusi penerimaan dari kapal kategori 30–100 GT menjadi lebih rendah;
2. Realisasi penerimaan Pas Masuk Pelabuhan Golongan VI untuk kendaraan bus baru mencapai **21,28%**. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pengunjung yang memasuki kawasan pelabuhan menggunakan kendaraan bus, terutama pada periode hari libur seperti libur Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri. Sebagian besar

- pengunjung lebih banyak menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat;
3. Penerimaan Jasa Tangki Mobil Air baru mencapai **19,19%**. Hal ini terjadi karena masih terdapat sejumlah kapal motor yang belum melakukan kegiatan operasional, sehingga kebutuhan pengisian air bersih ke kapal menjadi lebih rendah dibandingkan periode yang telah ditargetkan;
 4. Capaian penerimaan pada layanan Jasa Pemeliharaan Tanah/Prasarana baru berada pada angka 7,73%. Rendahnya penerimaan tersebut disebabkan adanya perubahan mekanisme pengenaan tarif. Sebelumnya, penerimaan diperoleh dari penggunaan tanah berdasarkan perjanjian sementara, namun saat ini telah dialihkan ke skema Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan melalui sistem sewa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Perubahan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.3521/DJPT.1/HK.410/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, sehingga penerimaan tidak lagi menggunakan mekanisme berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
 5. Sampai dengan Triwulan I, jenis penerimaan Jasa Tangki BBM dan Instalasi belum mencatatkan penerimaan meskipun telah memiliki target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan mekanisme pemanfaatan fasilitas tangki BBM yang saat ini digunakan oleh **Koperasi Nelayan Indonesia Bagya Bahari** melalui skema sewa berdasarkan Perjanjian Nomor **B.2253/PPN.PLR/PL.720/X/2025** tanggal 29 Oktober 2025, sehingga penerimaan pada akun layanan dimaksud belum dapat terealisasi pada periode berjalan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat tersebut, terdapat upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian PNBPN yaitu melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap seluruh jenis layanan yang berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jika dibandingkan dengan capaian penerimaan PNBPN pada satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PNBPN PPN Palabuhanratu adalah sebesar 192,97%.

SS 2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat

Sasaran kegiatan - 2 “Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun harian. Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan dengan pencatatan/pengumpulan data oleh petugas Enumerator. Data yang telah didapatkan kemudian diolah, diverifikasi, divalidasi untuk kemudian dilaporkan secara berkala.

Tabel 6. Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2026

SS 2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat											
IKU 2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu											
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2021	2022	2023	2024	2025	2026							
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026
788.43	716.00	704.76	3,570.82	1,176.77	6500.00	1070.00	1,126.00	105.23	17.32	-4.31	6500.00	17.32
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026
2,237.00	1,577.78	1,730.94	5,678.50	3,038.88		2520.00		0.00	0.00	-100.00		0.00
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026
3672	3147.08	4,388.00	9,369.00	5,948.62		5120.00		0.00	0.00	-100.00		0.00
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026
5,111.00	4,179.15	7,131.00	12278	7681.36		6500.00		0.00	0.00	-100.00		0.00

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah melampaui target yang

ditetapkan, yaitu sebesar 1.070 Ton, dengan realisasi yaitu 1.126 Ton atau setara dengan 105,23% dari target. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terjadi penurunan volume produksi yakni sebesar 4,31%. Pada Triwulan I Tahun 2025, produksi tercatat mencapai sekitar 1.176,71 ton, yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2026. Jumlah volume produksi perikanan tangkap tertinggi berada pada bulan Januari 2026 sebesar 442 Ton sedangkan yang terendah pada bulan Maret yaitu sebesar 338 Ton. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi cuaca di wilayah perairan selatan Samudera Hindia Selatan Jawa cenderung dipengaruhi intensitas hujan tinggi, gelombang laut yang lebih besar, serta angin yang relatif kuat akibat pola musim barat. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut nelayan menjadi lebih terbatas sehingga frekuensi operasi penangkapan mengalami penurunan. Berdasarkan informasi prakiraan dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, selama periode **Januari hingga Maret 2026** wilayah perairan selatan Pulau Jawa, termasuk kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, beberapa kali mengalami kondisi cuaca maritim yang kurang kondusif bagi operasional armada penangkapan.

Pada akhir Januari 2026, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi hingga 2,5–4 meter di wilayah Samudera Hindia selatan Jawa Barat yang dipicu oleh aktivitas bibit siklon tropis di selatan Pulau Jawa. Kondisi tersebut meningkatkan risiko keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal penangkap skala kecil hingga menengah, sehingga sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut.

Memasuki Februari 2026, BMKG juga mencatat adanya peningkatan intensitas hujan akibat fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) dan aktivitas gelombang ekuator yang memperkuat pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan tingginya curah hujan, peningkatan kecepatan angin, serta gangguan terhadap operasional penangkapan ikan di laut lepas. Pada periode yang sama BMKG kembali mengeluarkan peringatan adanya gelombang laut mencapai 1,25–2,5 meter di perairan selatan Jawa.

Kemudian pada Maret 2026, kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan signifikan. BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi pada 5–8

Maret 2026 serta 24–27 Maret 2026 di sejumlah wilayah perairan Indonesia akibat aktivitas beberapa bibit siklon tropis di selatan Indonesia dan pola angin monsun yang masih aktif. Situasi tersebut menyebabkan nelayan lebih berhati-hati dalam melakukan operasi penangkapan, sehingga frekuensi trip penangkapan dan volume ikan yang didaratkan mengalami penurunan.

Kondisi tersebut tercermin pada data produksi bulanan, dimana volume produksi pada **Januari 2026 tercatat sebesar 442 ton**, kemudian menurun pada **Februari menjadi 346 ton**, dan kembali menurun pada **Maret menjadi 338 ton**. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya gangguan cuaca maritim pada Februari–Maret berpengaruh langsung terhadap intensitas operasional armada penangkapan dan total hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan.

Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu sebesar 498,67% dari realisasi capaian PPN Prigi adalah 225,79 Ton.

Dari capaian yang telah didapatkan tersebut, terdapat juga faktor-faktor penghambat dalam mencapai target IKU 2 ini, antara lain:

1. Fasilitas kolam yang sudah dangkal dan terbatas menyebabkan kapal-kapal yang memiliki ukuran >100 GT tidak dapat masuk ke kolam dampak dari dangkalnya kolam dan ruang yang tidak mencukupi kapal untuk bermanuver masuk kedalam;
2. Terbatasnya jumlah petugas enumerator yang tidak sebanding dengan volume aktivitas pendaratan ikan menyebabkan kerap terjadi *data loos* dalam proses pencatatan hasil tangkapan.

SS 3. Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Sasaran Kegiatan - 3 “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu, Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu, Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu, Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu, dan Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN

Palabuhanratu

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu

Indikator ini menunjukkan persentase dari seluruh permohonan perusahaan yang telah dianalisis atau dievaluasi dengan jumlah permohonan perusahaan yang diajukan. IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.4 Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan sesuai keputusan Dirjen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui aplikasi PIPP. Perhitungan tersebut didasarkan pada tersediannya data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang meliputi pengumpulan laporan Inspeksi Pembongkaran Ikan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kegiatan K5, dan PNPB yang diinput pada aplikasi PIPP.

Tabel 7. Capaian IKU "Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026

SS 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing												
IKU 4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target	Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu			
2021	2022	2023	2024	2025	2026								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
82.17	85.5	86.25	86.08	87.91	87.00	87.00	88.00	101.15	101.15	0.10	87.00	101.15	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026	
83	85.75	87.13	89.42	95.00		87.00		0.00	0.00	-100.00		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026	
85.17	91.25	88.00	90.40	98.80		87.00		0.00	0.00	-100.00		0.00	

SS 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing											
IKU 4	Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu											
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2021	2022	2023	2024	2025	2026							
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026
84.5	87.67	88.58	87.83	99.25		87.00		0.00	0.00	-100.00		0.00

Secara umum, target capaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu periode triwulan I Tahun 2026 tercapai dengan nilai 88 dari target 87 atau sebesar 101,15% dari target yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh ketepatan waktu dan data penginputan pada website Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Dari data yang disampaikan capaian tingkat kinerja meningkat 0,10% dari tahun sebelumnya. Namun demikian nilai capaian kinerja pada triwulan ini belum termasuk maksimal karena terdapat beberapa data yang tidak terekam disebabkan adanya proses peralihan penilaian ke website PIPP yang baru. Jika dilakukan perbandingan dengan satker lain sebagai contoh yaitu PPN Prigi, capaian PPN Palabuhanratu menunjukkan persentase capaian sebesar 95,14% dari capaian PPN Prigi sebesar 92,50.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru - penyesuaian Triwulan 4 yang menunjukkan total dari Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). IKU baru ini dilakukan pengukuran secara tahunan. Dalam pencapaian IKU ini didukung oleh 5 (lima) orang SDM, yang terdiri dari 4 orang petugas penerbitan persetujuan berlayar (PB) dan STBLKK dan 1 (satu) orang petugas penerbitan SHTI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan tingkat pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu dibandingkan dengan masterplan PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat

yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. IKU ini dilakukan pengukuran secara tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru yang menunjukkan nilai pengendalian lingkungan yang didasarkan pada aplikasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan. Namun mulai dari Trwulan III Tahun 2026 terdapat pembaruan aplikasi SELARASKAN menjadi SELARASKAN V2 yang mengakibatkan adanya perbedaan pada cara penginputan hasil kerja ke aplikasi SELARASKAN V2.

Tabel 8. *Capaian IKU "Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026*

SS 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing												
IKU 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
-	-	-	90.65	87.70	33.00	33.00	81.53	247.06	247.06	-7.04	33.00	247.06	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2	

SS 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing											
IKU 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu											
Realisasi					Target	Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026							
-	-	-	96.86	88.08		33.00		0.00	0.00	-100.00		
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		
-	-	-	90.49	88.44		33.00		0.00	0.00	-100.00		
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		
-	-	83.18	87.79	90.68		33.00		0.00	0.00	-100.00		
											2026	
											0.00	
											%TW 3 2026	
											0.00	
											%TW 4 2026	
											0.00	

Dari target capaian Triwulan I yaitu sebesar 33, pencapaian indikator nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 81,53 atau realisasi capaian sebesar 247,06% dengan kategori “**Sangat Baik**”. Hal tersebut dapat dicapai karena beberapa faktor antara lain kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada semua indikator program *mandatory* maupun program *voluntary* serta ketepatan waktu penginputan pada Web SELARASKAN. Tercapainya capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian data hasil pengelolaan lingkungan yang diinput pada seluruh indikator baik dalam program *mandatory* maupun *voluntary*;
2. Ketepatan waktu penginputan data melalui platform web SELARASKAN, yang turut berkontribusi terhadap akurasi dan validitas data yang dilaporkan.

Meski demikian terjadi penurunan sebesar 7,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2026, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa data dukung yang tidak kemudian ditolak oleh verifikator seperti ketidaksesuaian pencantuman dokumentasi *bergeotagging* yang berisi waktu dan tempat, tidak adanya pengujian laboratorium pada kualitas air dan udara di lingkungan PPN Palabuhanratu, hanya melakukan pengujian mandiri menggunakan alat sederhana sehingga nilai yang didapatkan tidak maksimal. Nilai terendah pada Triwulan I ini berada pada bulan Januari 2026 yaitu sebesar 78,86, sedangkan nilai tertinggi berada pada bulan Maret 2026 yaitu sebesar 83,72. Jika dibandingkan dengan capaian satuan kerja lain yaitu PPN Prigi, capaian PPN

Palabuhanratu adalah 96,37% dari realisasi capaian PPN Prigi sebesar 84,60. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai SELARASKAN yaitu melakukan evaluasi dengan petugas-petugas yang terlibat secara berkala dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu sehingga pengumpulan data dukung sesuai, menjaga konsistensi dan akurasi penginputan data serta meningkatkan pemahaman petugas terhadap pentingnya pelaporan yang tepat waktu.

SS 4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu

Sasaran Kegiatan - 4 “Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dan Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pelabuhan binaannya. Perhitungan IKU ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran tahunan.

Tabel 9. *Capaian IKU " Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan" Triwulan I Tahun 2026*

SS 4		Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu											
IKU 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan											
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
	-	-	56	194	310.00	302.00	308.00	101.99	99.35	58.76	310.00	99.35	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026	
	-	-	92	216		305.00		0.00	0.00	-100.00		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026	

SS 4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan di PPN Palabuhanratu											
IKU 8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan											
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2021	2022	2023	2024	2025	2026							
	-	-	162	248		307.00		0.00	0.00	-100.00		0.00
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026
	61	50	182.00	304.00		310.00		0.00	0.00	-100.00		0.00

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja **Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan** pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan kinerja yang baik. Dari target yang telah ditetapkan sebesar **302 kapal**, capaian pada periode pelaporan tercatat sebanyak **308 kapal**, atau telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar **101,99%**. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 58,76% kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kapal perikanan izin daerah yang telah memenuhi ketentuan administratif maupun teknis operasional sesuai regulasi yang berlaku.

Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam memenuhi dokumen perizinan, kelengkapan operasional kapal, serta intensifikasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan terhadap pemilik kapal dan nelayan. Hambatan yang masih dihadapi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah belum tersedianya petugas yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) pada pelabuhan binaan. Keterbatasan sumber daya tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan sertifikasi kelaikan kapal, khususnya dalam mendukung pemenuhan aspek teknis kapal perikanan izin daerah agar sesuai dengan standar operasional dan ketentuan perizinan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian indikator pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada pada angka **54,04%** dari total capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang tercatat sebanyak **570 kapal**. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh variasi jumlah armada

perikanan aktif, karakteristik wilayah operasi penangkapan, tingkat aktivitas pendaratan kapal, serta struktur armada perikanan yang beroperasi pada masing-masing pelabuhan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 4.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2026. Indikator ini merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan persyaratan ketenagakerjaan bagi awak kapal perikanan. Indikator ini penting dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan awak kapal perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

1. Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
2. Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
3. Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
4. Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Pengukuran dilakukan dengan satuan nilai rata-rata dan bersifat kuantitatif dengan arah polaritas *maximizing* artinya semakin tinggi nilai yang dicapai maka semakin baik kinerjanya. Pada Tahun 225 ini target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 0,26. Pengukuran indikator ini yaitu semesteran.

SS 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
--

Sasaran Kegiatan - 5 “Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu” memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu; (3) Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu; (4) IP ASN PPN Palabuhanratu;

(5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu; (6) Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu; (7) Nilai IKPA PPN Palabuhanratu; (8) Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu; dan (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan percepatan pencapaian sasaaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi salah satu IKU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan ZI menuju WBK pada komponen pengungkit, hasil dan reform yang dihitung secara tahunan. Nilai diperoleh dari hasil penilaian tim internal KKP. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam mempersiapkan penilaian PM pembangunan zona integritas antara lain yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pemenuhan kelengkapan dokumen pembangunan zona integritas WBK.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan penyelesaian atas temuan Inspektorat Jenderal II Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan berdasarkan audit yang dilakukan pada tahun 2026.

Tabel 10. *Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026*

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026			% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
-	-	-	100	100	86.00	86.00	100	100	116.28	100.00	86.00	116.28	

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026			% TW 2	% Tahunan	TW 2			
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026	
-	-	-	100	100		86.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026	
-	-	-	100	100		86.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026	
-	-	100	100	100		86.00		0.00	0.00	0.00		0.00	

Sehubungan dengan tidak adanya reviu maupun audit dari pada PPN Palabuhanratu selama jangka waktu triwulan I atau bulan Januari hingga Maret 2026 maka capaian IKU 11 adalah sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 116,28%. Jika dibandingkan dengan satker lain yaitu PPN Prigi capaian IKU 11 adalah sama. Perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya pada triwulan yang sama menunjukkan tidak adanya pertumbuhan dikarenakan capaian bernilai sama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.12 Nilai PM SAKIP PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah indokator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelentasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas Implemetasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%), nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP. Indikator ini merupakan indikator baru dengan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.13 IP ASN PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif

tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

- Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus- kursus, dan Seminar/ Workshop/ Magang/ Sejenis);
- Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata- rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Berdasarkan hasil perhitungan keempat dimensi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tersebut, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
- Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
- Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
- Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung Tidak Profesional); dan

- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (Sangat Tidak Profesional).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja instansi. Untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaannya, penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Indikator ini mengukur sebesapa besar proporsi nilai pengadaan barang/jasa di PPN Palabuhanratu yang telah diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dibandingkan dengan total pagu pengadaan yang tersedia. RUP berfungsi sebagai perencanaan awal kegiatan pengadaan yang wajib diumumkan oleh setiap satuan kerja secara terbuka kepada publik dan pelaku usaha melalui platform SIRUP. Pengumuman RUP pada SIRUP bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kegiatan pengadaan barang/jasa, yang mendukung pelaksanaan pengadaan secara transparan dan efisien, serta memperkuat pengawasan publik terhadap belanja pemerintah. Semakin tinggi persentase pengumuman RUP di SIRUP, semakin baik kualitas perencanaan pengadaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata Kelola yang baik (*good governance*) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

IKU ini merupakan iku baru yang baru ada pada tahun 2026 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 11. *Capaian IKU "Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu" Tahun 2026*

SS 5 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu													
IKU 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)													
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
-	-	-	-	100	77.00	77.00	100.00	129.87	129.87	-	77.00	129.87	

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu											
IKU 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Palabuhanratu (%)											
Realisasi					Target	Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya		Renstra PPN Palabuhanratu	
2021	2022	2023	2024	2025	2026		% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026
-	-	-	-	100		77.00		0.00	0.00	-		0.00
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026
-	-	-	-	100				0.00	0.00	-		0.00
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026
-	-	-	-	100.00		77.00		0.00	0.00	-		0.00

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan capaian yang optimal. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 77%, indikator ini berhasil mencapai nilai 100%, atau setara dengan 129,87% terhadap target kinerja, sehingga target pada Triwulan I telah terpenuhi secara maksimal. Capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Nota Dinas Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2026 tanggal 7 April 2026. Berdasarkan nota dinas tersebut, nilai capaian indikator pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kewajiban pengumuman rencana pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Secara teknis, indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait kewajiban penyampaian dan pengumuman paket pengadaan melalui sistem Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengadaan yang baik. Capaian maksimal pada indikator ini menunjukkan bahwa proses administrasi pengadaan pada satuan kerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan perencanaan pengadaan pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan satuan kerja lain, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian indikator pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada pada tingkat yang sama, dimana kedua satuan kerja sama-sama memperoleh capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengumuman rencana umum pengadaan pada kedua satuan kerja telah berjalan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan bahwa tata kelola perencanaan pengadaan barang dan jasa pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip kepatuhan administrasi pengadaan pemerintah, sehingga mampu mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.15 Persentase Pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu

Indikator ini menggambarkan sejauh mana PPN Palabuhanratu melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Hal ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan status penggunaan, penghapusan aset rusak berat, hingga penyusunan laporan pengelolaan BMN secara periodik. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
3. Tersediannya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.16 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja. Dasar hukum penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator antara lain:

- Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian;
- Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;
- Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter;
- Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-

LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);

- Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;
- Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;
- Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00; dan
 - Kesalahan SPM yang diakibatkan kurang telitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Indikator Kinerja Utama 5.17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Palabuhanratu

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektifitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian Indikator Kinerja Program pada level Unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L; dan
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026.

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode berikutnya. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMARTDJA telah dibangun dan efektif digunakan sejak

tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 yang dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. Indikator ini memiliki periode perhitungan tahunan. Aplikasi ini dibangun dengan sistem *web-based* dan digunakan oleh seluruh kementerian/Lembaga pemerintahan Negara untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator baru (penyesuaian triwulan IV 2023) dengan perhitungan setiap triwulanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 12. *Capaian Indikator "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2026*

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu												
IKU 18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu												
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu		
2021	2022	2023	2024	2025	2026								
TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	TW 1	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2025	%TW 1 2026	
-	-	-	92.16	94.36	88.80	88.80	92.36	104.01	104.01	-2.12	88.80	104.01	
TW 2	TW 2	TW 2	TW 2	TW 2		TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		%TW 2 2026	

SS 5	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu											
IKU 18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Palabuhanratu											
Realisasi					Target		Realisasi	%Capaian		%Pertumbuhan dari tahun sebelumnya	Renstra PPN Palabuhanratu	
2021	2022	2023	2024	2025	2026							
-	-	-	92.84	95.01		88.80		0.00	0.00	-100.00		0.00
TW 3	TW 3	TW 3	TW 3	TW 3		TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		%TW 3 2026
-	-	-	94.5	95.43		88.80		0.00	0.00	-100.00		0.00
TW 4	TW 4	TW 4	TW 4	TW 4		TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		%TW 4 2026
-	86.14	92.88	94.72	98.59		88.80		0.00	0.00	-100.00		0.00

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada periode Triwulan I Tahun 2026 di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 88,80, hasil pengukuran memperoleh nilai 92,36 atau setara dengan 104,01% dari target kinerja, sehingga indikator tersebut berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap 173 responden yang merupakan pengguna jasa layanan di lingkungan pelabuhan. Hasil pengukuran terhadap unsur pelayanan menunjukkan terdapat tiga unsur dengan nilai tertinggi, yaitu U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur/Kemudahan Prosedur), U5 (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan), dan U9 (Sarana dan Prasarana/Kualitas Fasilitas Pelayanan). Tingginya penilaian pada ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa menilai prosedur pelayanan yang diterapkan cukup mudah dipahami, produk layanan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan, serta fasilitas pelayanan dinilai memadai dalam menunjang kenyamanan pengguna jasa. Sementara itu, unsur pelayanan dengan nilai terendah terdapat pada U4 (Biaya/Tarif atau Kesesuaian Biaya). Kondisi ini mengindikasikan masih adanya persepsi dari sebagian pengguna jasa terkait biaya layanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna, meskipun penerapan tarif pelayanan telah mengacu pada ketentuan PNBP yang berlaku. Aspek tersebut menjadi salah satu area evaluasi yang perlu mendapat perhatian pada periode berikutnya, khususnya melalui peningkatan transparansi informasi tarif serta penguatan pemahaman pengguna jasa terhadap dasar pengenaan biaya layanan.

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025, nilai SKM pada tahun 2026

mengalami penurunan sebesar 2,12%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori sangat baik dan tetap melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Penurunan tersebut menjadi bahan evaluasi agar kualitas pelayanan dapat terus dijaga secara konsisten sehingga tingkat kepuasan pengguna jasa tetap berada pada kategori optimal.

Dibandingkan dengan satuan kerja lain, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 99,89% dengan capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu sebesar 92,38. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kualitas pelayanan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang secara umum telah berjalan secara optimal, didukung oleh petugas pelayanan yang responsif, prosedur pelayanan yang sederhana, serta meningkatnya kesadaran pengguna jasa dalam melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen pelayanan yang dibutuhkan. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyelesaian layanan yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan tingkat kepuasan yang baik bagi pengguna jasa.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2026 telah diperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui SP DIPA — 032.03.2.560393/2026 Tanggal 30 November 2023 dengan nilai sebesar Rp. 14.587.542.000,- (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kelima kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan. Secara rinci, anggaran tiap kegiatan yang diperoleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan anggaran yang terealisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Tahun 2026

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM EFISIENSI(Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH EFISIENSI (Rp.)	REALISASI ANGGARAN(Rp.)	%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	318.181.000	177.405.000	38.543.953	22,10
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.269.361.000	13.856.198.000	5.104.692.941	36,84
JUMLAH		Rp. 14.587.542.000,-	Rp. 14.030.603.000,-	Rp. 5.143.236.894,-	36,66

Dari tabel 14 dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 5.143.236.894,- (lima miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 36,66% dari pagu sebesar Rp. 14.030.603.000 (empat belas miliar tiga puluh juta enam ratus tiga ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Triwulan IV tahun 2026. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelabuhan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dapat dilihat dari Dashboard Aplikasi Kinerjaku. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana tercantum dalam dashboard aplikasi Kinerjaku Tahun 2026 yaitu 105,18%.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Adapun rincian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu. Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan;
- 2) Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih belum optimal dikarenakan faktor cuaca dan alam;
- 3) Tingkat kinerja PPN Palabuhanratu. Capaian untuk indikator ini telah melebihi target yang ditentukan namun dikarenakan adanya *shifting* ke website baru sehingga ada beberapa data yang tidak dapat diperbaharui sehingga nilai menjadi kurang maksimal;
- 4) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan karena dokumen bukti dukung penilaian pada SELARASKAN dapat terpenuhi dan dapat melakukan penginputan data secara tepat waktu, namun adanya penurunan pada triwulan II dikarenakan adanya penyesuaian dengan pembaruan aplikasi baru yaitu SELARASKAN V2;
- 5) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal). Capaian telah

melampaui target yang telah ditentukan, namun terdapat sedikit hambatan yaitu tidak adanya petugas SKKP pada pelabuhan binaan sehingga penerbitan SKKP tidak bisa berjalan secara fleksibel dikarenakan jauhnya jarak antara pelabuhan perikanan ke pelabuhan binaan;

- 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu. Indikator ini berhasil mendapatkan nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan telah menindaklanjuti semua temuan yang ada sehingga realisasi mencapai 100%;
- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah melebihi target yang ditentukan;
- 8) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian indikator ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang baik sehingga para pengguna jasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja secara optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, upaya – upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang yaitu antara lain:

- a) Mempertahankan pelayanan jasa pelabuhan dan potensi PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk meningkatkan realisasi PNBP sebagaimana yang telah ditargetkan;
- b) Monitoring secara lebih fokus kedepannya agar capaian indikator kinerja tersebut dapat meningkat bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan;
- c) Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut :
 - Setiap penanggungjawab kegiatan harus konsisten terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - Perlu ditingkatkan kepedulian, evaluasi secara sistematis dalam rangka pencapaian indikator kinerja secara berkala.
- d) Mengoptimalkan sarana pelabuhan yang tersedia dan membangun sarana atau

fasilitas pelabuhan untuk menunjang operasional, PNBP terutama PNBP Pasca produksi dan pelayanan pelabuhan kepada masyarakat perikanan;

- e) Mengoptimalkan pengelolaan manajemen mutu bidang-bidang pelayanan pelabuhan, dengan melakukan penerapan ISO 9001:2015 secara terus-menerus guna menjamin mutu pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder*.

4.3 TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI SEBELUMNYA

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan I tahun 2026 yaitu :

1. Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi dengan tim pengelola SELARASKAN V2 guna meningkatkan kualitas pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL secara berkala terkait dengan perubahan sewa lahan dan bangunan.

4.4 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu triwulan I tahun 2026, rekomendasi yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan kembali dan memastikan data yang diinput pada aplikasi PIPP telah sesuai dan tercatat;
2. Melakukan monitoring terhadap pengisian data pada aplikasi SELARASKAN V2;
3. Melakukan revisi halaman III DIPA.